DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Agustino, Leo. 2014. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabet.

Dye, Thomas, R. 1966. *Politics, Economic, and The Publics : Policy Outcomes in the Fifty State*. Chicago : Rand-McNally.

Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congresional Quarterly Press.

Hasibuan, Malayu. 1996. *Manajemen Dasar, Pengertian Dan Masalah*. Jakarta:PT. Toko Gunung Agung.

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys*. Yogyakarta: Gava Media.

Islamy, M. Irpan.. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara.* Jakarta: Sinar Grafika.

Kotler, Philip. 2006. *Manajemen Pemasaran Edisi 11*. Jakarta: PT. Indeks.

Ma'aruf, Hendri. 2006. *Pemasaran Ritel*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*. New York: HarperCollins.

Moeloeng J, Lexi. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik.* Bandung:CV. Alfabet.

Nugroho D, Rian. 2006. *Kebijakan Publik, formulasi, Implementasi dan evaluas*i. Jakarta: Media Komputindo.

Sugiyono, 2005. M*emahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet.

Subarsono Agus, 2006. *Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teory & Aplikasinya* Jogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tangkilisan, Hessel. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset.

Van Meter, Donald dan Van Horn, Carl E .1975, *The Policy Implemention Process : A Conceptual Framework* (Journal Administration and Society.

Wahab, Solichin. Abdul. 2015. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Jakarta: PT.Buku Seru.

B. Dokumen-Dokumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Keputusan Presiden Nomor 96 tahun 2000 Tentang Bidang usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu bagi Penanaman Modal.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Peraturan Daerah Kota Bandung No. 02 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonomi.

Peraturan Walikota Bandung No.335 Tahun 2012 Tentang Mekanisme Perizinan, Kemitraan dan Waktu Pelayanan Pusat Pembelanjaan dan/atau Toko Modern.

Surat Edaran Walikota Bandung Tanggal 14 November 2012 tentang Evaluasi Keberadaan Toko Modern/Moratorium

C. Rujukan Elektronik

http://www.tribunnews.com/regional/2014/04/19/bandung-kelebihan-minimarket